



Melacak Gagasan Dakwah Multikultural dalam Falsafah Pancasila

Anggit Rizkianto

STID Al-Hadid Surabaya

anggitrizkianto@gmail.com

Abstrak: Sebagai pendekatan dakwah yang dianggap paling tepat untuk masyarakat dengan ragam identitas, dakwah multikultural masih menemui sejumlah tantangan, sehingga gagasannya perlu terus dikembangkan. Studi ini berupaya melacak, sekaligus pula menemukan, gagasan-gagasan yang memuat ajaran dakwah multikultural dalam Pancasila yang merupakan falsafah kebangsaan Indonesia. Studi ini adalah studi teks, yang menempatkan teks sebagai dokumen sejarah sekaligus sumber informasi. Sedangkan uji keabsahan datanya menggunakan metode triangulasi sumber dan kritik sumber. Hasil studi menunjukkan bahwa ajaran-ajaran dakwah multikultural dapat ditemukan dalam Pancasila, meskipun bentuknya berupa “percikan-percikan” gagasan. Kelima sila dalam Pancasila mengajarkan tentang penguatan agama sekaligus toleransi; persaudaraan atau persatuan, baik sesama manusia maupun sesama warga bangsa; kerja sama dan bermusyawarah-mufakat; serta mewujudkan kesejahteraan umat/ masyarakat. Semuanya penting untuk sinergitas gerakan dakwah dan penguatan multikulturalisme di Indonesia.

Kata kunci: Dakwah, Dakwah Multikultural, Multikulturalisme, Pancasila

Abstract: *Tracing Multicultural Da'wah Ideas within the Philosophy of Pancasila*

As the most appropriate da'wah approach for a society with diverse identities, multicultural da'wah still faces numerous challenges, requiring its concepts to be continuously developed. This study attempts to trace, as well as discover, the ideas containing the concept of multicultural da'wah within Pancasila, the national philosophy of Indonesia. This is a textual study that treats texts as historical documents and sources of information. Meanwhile, data validity was tested using source triangulation and source criticism methods. The results indicate that the concept of multicultural da'wah is present within Pancasila, albeit in the form of “sparks” of ideas. All five principles of Pancasila teach the strengthening of religion alongside tolerance; brotherhood or unity, both among fellow human beings and fellow citizens; cooperation and deliberation for consensus; and the realization of public welfare. All of these are crucial for the synergy of da'wah movements and the reinforcement of multiculturalism in Indonesia.

Keywords: Da'wah, Multicultural Da'wah, Multiculturalism, Pancasila

Pendahuluan

Syaiful Arif, Direktur Pusat Studi Pemikiran Pancasila (PSP), dalam satu esainya mengungkapkan bahwa pemahaman terhadap sila Ketuhanan yang Maha Esa

seharusnya tidak berdasarkan perspektif agama tertentu, melainkan prinsip-prinsip universal agama. Sebab, sejarah menunjukkan sila pertama Pancasila itu

memang dirumuskan dengan cara demikian.¹

Apa yang ditulis Syaiful Arif itu memiliki arti penting bagi kehidupan beragama bangsa Indonesia. Dengan adanya Pancasila, maka Indonesia—sebagai bangsa dan negara—harus menjadi ruang aman bagi setiap agama. Inklusivitas dan keragaman keyakinan harus dijamin keberadaannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Di saat yang sama, umat beragama haruslah menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila adalah “titik temu” bagi semua pandangan hidup di Indonesia, termasuk pandangan hidup yang lahir dari agama-agama.² Dalam bahasa cendekiawan Nurcholish Madjid, Pancasila adalah *common platform* atau *kalimah sawa’* yang memainkan peran sebagai titik temu umat beragama Indonesia. Baginya, Pancasila adalah satu-satunya perekat untuk bangsa yang multietnis sekaligus multiagama di negeri ini.³

Atas dasar itu, sudah seyogianya pesan keagamaan disampaikan lewat cara-cara adaptif dan inklusif agar tidak mengakibatkan konflik. Ini adalah sebuah kemestian, atau barangkali keniscayaan, yang tak terhindarkan jika ingin mempertahankan kebinekaan yang telah menjadi identitas bangsa. Dakwah multikultural lantas diyakini sebagai

pendekatan paling tepat ketika seorang pendakwah atau kelompok dakwah berhadapan dengan lingkungan yang kompleks dan masyarakat yang heterogen, karena pendekatan inilah yang berakar pada prinsip inklusivitas.⁴

Hanya saja, dakwah multikultural hingga hari ini masih juga menghadapi tantangan. Misalnya saja adanya resistensi dari kelompok konservatif yang masih mempertahankan dakwah dengan cara-cara tradisional.⁵ Agaknya ini dipengaruhi karakteristik dakwah multikultural yang memiliki perbedaan fundamental dari pendekatan dakwah konvensional yang sudah mengakar kuat. Dalam pendekatan multikultural, dakwah tidak lagi berorientasi pada kuantitas, melainkan lebih pada kualitas dalam hal keadilan, kesejahteraan, kesetaraan hak, dan kebaikan-kebaikan lain yang harus melekat pada umat Islam maupun kemanusiaan secara universal.⁶

Gagasan dakwah multikultural selalu memandang bahwa keragaman agama dan budaya adalah sesuatu yang muskil diubah karena itu adalah sunatullah. Adalah kesia-siaan belaka jika ada yang mencita-citakan seluruh manusia di dunia menjadi satu umat. Cita-cita semacam itu bahkan menentang ketetapan Allah Swt. yang memang menciptakan manusia secara beragam dan tidak menjadi satu

¹ Syaiful Arif, “Menjernihkan Religiusitas Pancasila,” Kompas.id, 5 Agustus 2022, <https://www.kompas.id/artikel/menjernihkan-religiusitas-pancasila>.

² Idrus Ruslan, *Negara Madani: Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara* (SUKA-Press, 2015), 20.

³ Nurcholish Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia* (Yayasan Wakaf Paramadina, 1995), 76.

⁴ Yudha Catur Pamungkas dkk., “Konstruksi Dakwah Multikultural Menurut Roza Melina Mazlin,” *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 1 (2025): 1–9, <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.3714>.

⁵ Pamungkas dkk., “Konstruksi Dakwah Multikultural Menurut Roza Melina Mazlin.”

⁶ Zapurkhan Zapurkhan, “Dakwah Multikultural,” *MAWA'IZH: JURNAL DAKWAH DAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMANUSIAAN* 8, no. 1 (2017): 160–77, <https://doi.org/10.32923/maw.v8i1.703>.

identitas sebagaimana firman-Nya yang berbunyi, “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”⁷

Dalam hal ini, dakwah multikultural membawa pemikiran yang mencoba membedakan antara Islam sebagai agama yang terinstitusi dan Islam sebagai sikap hidup. Prinsip yang kedua inilah yang dikedepankan oleh pendekatan dakwah ini. Ada semacam keyakinan bahwa Islam sebagai sikap hidup—yang fokusnya pada kualitas kebaikan yang bersifat universal—mestinya juga dapat ditemukan pada ajaran agama-agama lain.⁸ Maka, atas dasar itu pula, dalam perspektif dakwah multikultural—sebagaimana pula kerap disinggung Nurcholish Madjid—mengajak orang pada Islam tidak selalu identik dengan mengajak orang beragama Islam. Pikiran ini didasari oleh prinsip keuniversalan Islam itu sendiri, yang dinyatakan pula dalam Al-Qur’an bahwa risalah Muhammad SAW tidak hanya untuk suatu kaum pada suatu masa, tetapi juga untuk seluruh alam—termasuk semua manusia dengan ragam keyakinan agama.⁹

Secara gagasan, dakwah multikultural pada akhirnya memang agak berseberangan dengan pemikiran dakwah yang mengusung Islam sebagai *manhaj hayah* atau Islam sebagai *daulah*, sebagaimana yang dulu digagas tokoh

Islam Sayyid Quthub dan diikuti aktivis-aktivis dakwah hingga hari ini. Alih-alih bergerak ke arah institusionalisasi agama, dakwah multikultural lebih mengedepankan strategi sosialisasi ajaran Islam dengan pendekatan kebudayaan dan, yang tak kalah penting, ia adalah bagian integral dari umat itu sendiri.¹⁰

Selain itu, dakwah multikultural juga menghadapi tantangan lain: rendahnya literasi multikulturalisme para pendakwah. Ini berarti kurangnya wawasan dan kesadaran tentang kebinekaan dan nilai-nilai kebangsaan di kalangan orang-orang yang bergelut di lapangan dakwah masih menjadi masalah.¹¹ Padahal, multikulturalisme di era modern tidak hanya menuntut pengakuan adanya perbedaan, tetapi juga kemampuan menjalin relasi yang harmonis meski terdapat perbedaan keyakinan, nilai, maupun agama. Pasalnya, globalisasi—kondisi yang identik dengan kemajuan teknologi dan mobilisasi tinggi—telah mengakselerasi interaksi antarbudaya. Ia juga mencipta ruang-ruang percakapan baru; kecanggihan teknologi informasi, dengan segala produk turunannya, telah merobohkan sekat-sekat interaksi dengan kelahiran dunia virtual. Akibatnya, interaksi sosial tanpa batas identitas menjadi tak terbendung. Di dunia maya, segalanya lebur dan bercampur baur.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang kebinekaan dan nilai-nilai

⁷ “Surah Yunus - 99-109,” Quran.com, diakses 3 Juni 2026, <https://quran.com/id/yunus/99-109>.

⁸ Zaprul Khan, “Dakwah Multikultural.”

⁹ Zainal Abidin, “Teologi Inklusif Nurcholish Madjid: Harmonisasi Antara Keislaman, Keindonesiaan, dan

Kemoderenan,” *Humaniora* 5, no. 2 (2014): 665, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3123>.

¹⁰ Zaprul Khan, “Dakwah Multikultural.”

¹¹ Pamungkas dkk., “Konstruksi Dakwah Multikultural Menurut Roza Melina Mazlin.”

kebangsaan menjadi penting demi memastikan keharmonisan di masyarakat. Sebab, interaksi yang intens dan serba terbuka—yang didorong teknologi informasi—bagaimanapun dapat memicu gesekan serta konflik sosial.¹²

Apabila bangsa Indonesia hidup tanpa literasi yang cukup tentang multikulturalisme, maka stabilitas sosial-politik akan terus rentan. Kondisi yang kompleks di lapangan pun sebenarnya menunjukkan adanya gejala ini. Meskipun masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan dalam keberagaman, harmoni yang tercipta tetap terasa kosong. Praktik toleransi juga acapkali bersifat dangkal lantaran tidak ditopang pemahaman mendalam.¹³ Alhasil, potensi konflik selalu ada, dan kondisinya sering jadi makin runyam karena faktor teknologi. Media sosial sering menjadi kanal-kanal bebas hambatan dalam penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian. Dalam perspektif keagamaan, hal-hal seperti ini tidak hanya menghambat penyebaran pesan agama, tetapi juga mengusik kehidupan beragama itu sendiri.¹⁴

Di lapangan dakwah, masalah serupa juga makin kerap terjadi. Problematika dakwah

di era yang serba digital adalah bagaimana kegiatan ini sering menjadi ajang propaganda pihak-pihak tak bertanggung jawab. Isu agama adalah salah satu isu yang sering “direkayasa” sedemikian rupa untuk memprovokasi publik dan menciptakan kegaduhan.¹⁵

Lebih jauh lagi, masalah ini juga berkaitan dengan radikalisme agama yang prosesnya tidak berlangsung dalam semalam. Radikalisasi seringkali tidak melalui proses pengajaran secara langsung. Ia terbentuk secara bertahap, dan memanfaatkan keterlibatan emosi agama. Celakanya, dunia maya membuatnya makin teruk, karena prosesnya dapat berlangsung terus-menerus, sehingga kekerasan simbolik yang mengatasnamakan agama jadi dianggap wajar—audiens di dunia maya sering menormalisasi ujaran kebencian, bahkan persekusi, hanya karena ada “agama” yang melegitimasi. Manakala emosi keagamaan dimanfaatkan bahkan dieksploitasi, dakwah akhirnya kehilangan fungsi edukatifnya dan hanya jadi alat provokasi yang kental nuansa politis.¹⁶ Akar permasalahan ini memang sangat kompleks¹⁷, tapi setidaknya harus diakui

¹² Maulana Firman Ramadani, “Tantangan dan toleransi serta multikulturalisme di Indonesia era modern,” *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 4, no. 4 (2026).

¹³ Ramadani, “Tantangan dan toleransi serta multikulturalisme di Indonesia era modern.”

¹⁴ Randi Tamirano, “Peran Manajemen Konflik dalam Meningkatkan Efektivitas Dakwah Multikultural di Indonesia,” *JMDIK: Jurnal Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 35–49.

¹⁵ Firdaus Muhammad dan Khaerunnisa Khaerunnisa, “Problematika Dakwah Di Tengah Propaganda Agama Di Media Sosial (Perspektif Komunikasi Politik Islam),” *Jurnal Jurnalisa* 6, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v6i1.13512>.

¹⁶ Karina Radhiatun Daing dkk., “Propaganda Digital Dan Distorsi Jihad: Tantangan Pencegahan Radikalisme Di Indonesia,” *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2026): 1855–63.

¹⁷ Banyak riset menunjukkan akar persoalan radikalisme memang tidak pernah tunggal. Beberapa pakar menyebut ia berkaitan erat dengan masalah ekonomi; militansi Islam di beberapa negara berhubungan dengan pemuda pengangguran dan tunawisma yang direkrut kaum islamis, lihat John L. Esposito dan John O. Voll, *Islam and Democracy* (Oxford University Press, 1996). Di riset lain juga disebut bahwa kekerasan fundamentalisme Islam berkaitan dengan frustrasi akibat modernisasi yang menempatkan orang Islam dalam kelas pekerja rendahan, lihat Roxanne L. Euben, *Enemy in the Mirror*:

adanya andil ajaran dakwah, atau seruan *amar makruf nahi mungkar* bahkan jihad, yang membentuk sikap radikal itu pada seseorang atau sekelompok orang, dan ini melewati proses kognitif dan psikologis yang mampu mengubah sesuatu yang sebelumnya dianggap tercela menjadi perjuangan moral.¹⁸

Kehadiran negara untuk menciptakan harmoni di tengah banyaknya perbedaan tentu keharusan yang tidak bisa ditawar. Berbagai hal telah dilakukan pemerintah demi menekan konflik keagamaan tetapi persoalan itu tetap tak terhindarkan.¹⁹ Belakangan, konflik antarumat beragama bahkan menjelma dalam bentuk perusakan dan vandalisme di tempat ibadah dengan orang Islam sebagai aktor utamanya.²⁰ Di internal umat Islam sendiri, gesekan yang sering dipicu problem *furu'iyah* masih kerap menghantui. Konflik terjadi antara kelompok moderat dengan kelompok salafi yang sering menyalahkan praktik keagamaan tertentu lantaran dianggap *bid'ah*, atau antara kelompok yang sering menggaungkan Islam Nusantara dengan kelompok yang bahkan

tak sudi membicarakannya.²¹ Tentu ini adalah ironi yang tidak bisa ditampilkan. Ketika negara sudah turun tangan menyeru pada kerukunan dengan Moderasi Beragama²², misalnya, umat Islam justru makin berkubang dalam ketegangan yang tidak perlu.

Studi ini bermaksud mengkaji lagi gagasan dakwah multikultural yang sudah cukup lama diwacanakan, namun dengan mengaitkannya pada Pancasila. Yang menjadi dasar pemikirannya adalah sebuah pandangan bahwa Pancasila sejatinya adalah falsafah kebangsaan, yang dalam bahasa Yudi Latif kerap disebut *leitstar* (bintang penuntun)²³, termasuk dalam hal kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Maka, yang menjadi tujuan dari studi ini adalah melacak, sekaligus pula menemukan, gagasan-gagasan yang memuat ajaran dakwah multikultural dalam alam pemikiran Pancasila.

Mencari gagasan dakwah multikultural dengan menjadikan Pancasila sebagai rujukan adalah upaya untuk “kembali”

Islamic Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism: A Work of Comparative Political Theory (Princeton University Press, 1999), <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691058443/enemy-in-the-mirror>.

¹⁸ Nurjannah Nurjannah, “Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah,” *Jurnal Dakwah* 14, no. 2 (2013): 177–98, <https://doi.org/10.14421/jd.2013.14202>.

¹⁹ Aretsa Zana Ayunda dkk., “Tantangan Multikulturalisme di Indonesia: Menyoal Relasi Agama dan Ruang Publik,” *ALSYS* 2, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.58578/alsys.v2i1.138>.

²⁰ M. Toto Suryaningtyas, “Perusakan Makam dan Problem Multikulturalisme di Indonesia,” *Kompas.id*, 25 Mei 2025, <https://www.kompas.id/artikel/perusakan-makam-dan-problem-multikulturalisme-di-indonesia>.

²¹ Sukron Kamil, “Idul Fitri dan Multikulturalisme,” *Kompas.id*, 23 April 2023,

<https://www.kompas.id/artikel/idul-fitri-dan-multikulturalisme>.

²² Moderasi Beragama yang dimaksud penulis adalah program yang diinisiasi oleh Kementerian Agama RI di bawah pimpinan Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama RI periode 2014-2019. Program ini diluncurkan pada 2019 bersamaan dengan diterbitkannya buku *Moderasi Beragama* yang berisi kajian konseptual dan strategi implementasi moderasi beragama sebagaimana dimaksud Kementerian Agama RI. Program ini juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.

²³ Yudi Latif, “REAKTUALISASI PANCASILA,” Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2019, [https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_Reaktualisasi%20Pancasila%20\(Yudi%20Latif\).pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_Reaktualisasi%20Pancasila%20(Yudi%20Latif).pdf).

pada apa yang telah menjadi konsensus bangsa. Apalagi perihal agama atau kehidupan beragama bukan sesuatu yang asing dalam nilai-nilai Pancasila. Bahkan, perihal kepentingan untuk membangun peradaban yang religius, atau masyarakat yang hidup berdasarkan ajaran agama, sudah menjadi pokok pembicaraan utama ketika Pancasila dirumuskan.²⁴

Studi ini tidak hendak menjawab pemikiran-pemikiran yang berseberangan atau berkeberatan terhadap gagasan dakwah multikultural yang datang dari beberapa kelompok sebagaimana telah disinggung. Yang dilakukan di sini pada dasarnya adalah memperluas wacana dakwah multikultural itu sendiri. Upaya ini diharapkan dapat menjadi “bahan” untuk memperkuat dakwah multikultural baik secara gagasan maupun praktik di lapangan. Secara tidak langsung ini juga dapat menjadi wacana dalam menyinergikan dakwah dan literasi multikulturalisme di Indonesia.

Studi-studi sebelumnya tentu sudah mengkaji dakwah multikultural dari

banyak sudut pandang. Yang terbaru ada studi yang menggali gagasan dakwah multikultural lewat pemikiran A. Mustofa Bisri, yang fokusnya pada upaya pengembangan dakwah di tengah keragaman budaya lokal.²⁵ Studi selanjutnya yang juga menggali gagasan dakwah multikultural dari pemikiran tokoh adalah riset yang berjudul “Gus Dur’s Multicultural Da’wah And Its Relevance To Modern Society” dan “Islam Rahmatan Li ‘L-Alamin Sebagai Landasan Dakwah Multikultural: Perspektif Muhammad Fethullah Gulen”. Keduanya menelaah pemikiran multikulturalisme dari dua tokoh yang dianggap penting: Gus Dur dan Fethullah Gulen.^{26,27} Pada riset yang lain, dakwah multikultural dikaji lewat perspektif Al-Qur’an, terutama lewat ayat-ayat yang membicarakan tentang multikulturalisme.²⁸ Dan pada riset yang lain lagi, dakwah multikultural coba ditajamkan dengan gagasan humanisme, untuk kemudian diformulasikan menjadi bentuk revitalisasi dakwah yang akrab pada nilai-nilai kemanusiaan.²⁹

²⁴ Perjuangan untuk memperjuangkan agama bahkan negara agama (Islam) sudah terjadi sejak sidang BPUPK pertama, lalu berlanjut dalam Panitia Sembilan hingga menjelang sidang PPKI. Ini melibatkan tokoh-tokoh Islam atau kelompok Nasionalis Religius yang berasal dari beberapa organisasi Islam, namun dalam proses kompromi dan melalui proses yang demokratis Islam pada akhirnya tidak menjadi dasar negara dan kepentingan memperjuangkan agama terakomodasi dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa. Lihat misalnya Sukirno, “Posisi Agama Dalam Konstruksi Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945,” *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 2 (2021): 96–115, <https://doi.org/10.30588/jhcj.v1i2.920>.

²⁵ Qorry Aini dkk., “Konstruksi Dakwah Multikultural di Tengah Keragaman Budaya Lokal: Studi Pemikiran Gus Mus,” *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought* 1, no. 1 (2026): 29–41.

²⁶ A. Fikri Amiruddin Ihsani dkk., “Gus Dur’s Multicultural Da’wah and Its Relevance to Modern Society,” *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 23, no. 1 (2021): 103–22, <https://doi.org/10.18860/eh.v23i1.11642>.

²⁷ Achmad Bisri, “ISLAM RAHMATAN LI ‘L-‘ĀLAMĪN SEBAGAI LANDASAN DAKWAH MULTIKULTURAL: PERSPEKTIF MUHAMMAD FETHULLAH GÜLEN,” *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 2 (2014): 479–94, <https://doi.org/10.21580/ws.22.2.290>.

²⁸ Agung Teguh Prianto, “Komunikasi Dakwah Berbasis Multikultural dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2023): 193–210, <https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkpi.v1i1.15>.

²⁹ Hendra Bagus Yulianto, “Nalar Kemanusiaan Dalam Da’wah Multikultural: Upaya Memformulasikan Pesan Dakwah Humanis,” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* XII, no. 1 (2020): 72–92.

Dengan demikian, apa yang hendak dicapai studi ini diharapkan dapat mengisi satu “ruang kosong” dalam pengembangan studi dakwah, khususnya dakwah multikultural yang memang perlu terus dikembangkan. Studi ini mengambil fokus pada kaitannya dengan falsafah kebangsaan karena hal itu dipandang sangat relevan ketika dakwah multikultural ditempatkan dalam konteks keindonesiaan.

Metode

Studi ini merupakan studi teks, sebuah upaya rekonstruksi rasional dan historis terhadap teks-teks yang hendak dipelajari.³⁰ Jadi, dalam riset ini semua teks yang menjadi sumber informasi dianggap sebagai dokumen sejarah—yang terikat konteks dan bersifat dinamis. Maka, yang dilakukan di sini tidak hanya mempelajari teks itu sendiri—menyajikan dan mendeskripsikannya, tetapi juga mempelajari kaitannya dengan teks-teks lain, melakukan problematisasi terhadapnya dalam rangka menghasilkan ide atau gagasan-gagasan tertentu.

Merujuk pada literatur lain, studi teks juga dapat diartikan sebagai riset yang mengkaji teks secara mendalam baik mengenai isi dan maknanya maupun struktur dan wacananya.³¹ Teks selalu dianggap sebagai sesuatu yang hidup dan

dinamis, sehingga ia perlu dianalisis secara kualitatif. Terlebih sesuatu yang dianggap teks itu tidak melulu berupa narasi tertulis, tetapi ia lebih dari itu—segala informasi yang bisa ditafsir.³²

Dalam konteks studi ini, teks-teks yang dipelajari adalah teks-teks yang berkaitan dengan Pancasila dan dakwah multikultural baik itu berupa buku, artikel, dokumen, atau bentuk-bentuk lain. Penting untuk diperhatikan bahwa teks terkait Pancasila diambil dari para penggagas, perumus, maupun penafsir Pancasila yang dianggap otoritatif. Hal ini penting untuk menjaga keautentikan gagasan, sehingga manakala teks itu direkonstruksi secara rasional ia tidak menyeleweng secara historis.

Untuk masalah keabsahan, studi ini bertumpu pada dua metode: triangulasi sumber dan kritik sumber.³³ Triangulasi sumber berarti membandingkan sumber satu dengan sumber lain. Sedangkan kritik sumber berarti memeriksa dan memastikan keaslian sekaligus kredibilitas setiap sumber informasi yang didapatkan.³⁴ Tujuan dari kritik sumber pada dasarnya adalah untuk memastikan bahwa isi yang terkandung dalam suatu sumber dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan.³⁵

³⁰ Richard Rorty dkk., *Philosophy in History: Essays in the Historiography of Philosophy* (Cambridge University Press, 1984), 49–53.

³¹ Mudjia Rahardjo, “Studi Teks dalam Penelitian Kualitatif,” Teaching Resources, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,, 2018, <http://repository.uin-malang.ac.id/2480/>.

³² Lisa M. Given, *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods* (SAGE Publications, 2008), 865.

³³ Kedua hal ini meminjam metode dalam penelitian sejarah, karena sebagaimana dijelaskan sebelumnya, studi teks adalah upaya rekonstruksi historis. Sehingga kajian ini juga beroperasi sebagaimana peneliti sejarah ketika ia mempelajari dokumen-dokumen yang menjadi sumber informasi.

³⁴ Helius Sjamsuddin, *Metodologi sejarah* (Penerbit Ombak, 2020), 135–36.

³⁵ Alian Alian, “Metodologi Sejarah Dan Implementasi Dalam Penelitian,” *Jurnal Pendidikan Dan Kajian*

Hasil dan Pembahasan

Dakwah dan Multikulturalisme

Dakwah dalam studi ini perlu dipahami dalam konteks luas. Ini penting untuk memahami kaitannya dengan dakwah multikultural dan menemukan esensi-esensi gagasannya dalam konteks kebangsaan Indonesia dan lebih khusus lagi pada nilai-nilai Pancasila.

Dalam beberapa literatur, dakwah sering didefinisikan sebagai perbuatan mengajak manusia kepada jalan yang benar dengan cara bijaksana sesuai perintah Tuhan agar mereka mendapat kemaslahatan di dunia dan akhirat.³⁶ Dalam definisi yang agak mirip, dakwah juga dapat diartikan sebagai mengajak umat manusia dengan hikmah kebijaksanaan agar mengikuti Allah dan rasul-Nya.³⁷

Kedua definisi di atas memang cenderung normatif karena dakwah hanya ditempatkan sebagai perintah atau ajaran moral berbasiskan agama semata. Namun, di sisi lain, dakwah juga dapat didefinisikan secara lebih politis. Ia juga dapat didefinisikan sebagai gerakan mengubah Islam (sebagai suatu keyakinan, agama) menjadi tatanan kehidupan baik pada ranah individu, keluarga, jemaah, *ummah*, hingga *daulah*.³⁸ Dalam sumber lain,

definisi serupa juga dapat ditemukan manakala dakwah diartikan sebagai proses internalisasi, transmisi, difusi, institusionalisasi, dan transformasi Islam yang melibatkan unsur-unsur seperti pendakwah, objek dakwah, pesan, media, metode, tujuan, respons, serta dimensi ruang dan waktu demi mencapai kehidupan yang *hasanah* baik itu di dunia maupun akhirat.³⁹ Maka, definisi dakwah seperti ini menjadi begitu lekat dengan konsep gerakan, perubahan sosial, hingga kekuasaan.

Dalam hal menegakkan Islam, dakwah memang dapat mengambil dua bentuk: kultural dan struktural.⁴⁰ Dakwah kultural lebih bersifat akomodatif terhadap kultur-kultur yang berkembang di masyarakat; ia beroperasi secara inovatif dengan memahami kebudayaan target dakwah agar ajaran Islam diterima. Dakwah kultural juga bersifat *bottom-up*, dengan memberdayakan kehidupan beragama yang sudah ada. Ini berbeda dengan dakwah struktural yang cenderung *top-down*. Kuntowijoyo menjelaskan bahwa dakwah struktural pada dasarnya adalah strategi—memanfaatkan struktur yang ada dan mengarah ke pengambilan keputusan politik, seperti birokrasi, lembaga-lembaga negara, partai-partai dan usaha lainnya.⁴¹

Sejarah (Criksetra) 2, no. 2 (2012), <https://repository.unsri.ac.id/22614/>.

³⁶ Toha Yahya Oemar, *Ilmu Dakwah* (Wijaya, 1997), 1.

³⁷ Lihat misalnya Hamzah Ya'qub, *Publisistik Islam: teknik da'wah dan leadership* (Diponegoro, 1992), Bandung.

³⁸ Amrullah Ahmad, "Konstruksi Keilmuan Dakwah dan Pengembangan Jurusan-Konsentrasi Studi," *Pengembangan Keilmuan Dakwah dan Prospek Kerja* (Semarang), 20 Desember 2008.

³⁹ Ahmad Subandi, "Hakikat Dan Konteks Dakwah," *ALQALAM* 18, no. 90-91 (2001): 74, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v18i90-91.1464>.

⁴⁰ Lihat misalnya Tegar Efrizal dkk., "Paradigma Pemikiran Lembaga Dakwah: Analisis Normatif, Struktural, Kultural Dan Transformatif," *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 3 (2026): 412-18, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v4i3.6528>.

⁴¹ Kuntowijoyo, "Menjadikan Dua Strategi Saling Komplementer," dalam *Islam Demokrasi Atas Bawah Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gusdur Dan Amien Rais* (Pustaka Pelajar, 1996), 21.

Sementara Abdul Basit secara tegas mengemukakan dakwah struktural adalah strategi dakwah yang diperjuangkan lewat jalan kekuasaan.⁴² Ali Aziz lantas punya pandangan serupa, yang menempatkan dakwah struktural sebagai suatu pendekatan untuk mencapai kehidupan yang lebih mulia. Menurutnya, dakwah juga dapat dilakukan dengan membangun kesejahteraan dan religiusitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui politik. Untuk itu diperlukan aktor politik di lembaga legislatif yang berperan membentuk undang-undang, juga di lembaga eksekutif yang berjuang menyelenggarakan pemerintahan berdasar produk hukum demi mewujudkan kehidupan yang islami.⁴³

Tatkala pemahaman terhadap dakwah semakin terhubung dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, saat itulah multikulturalisme semakin relevan untuk dipahami juga. Sebab, keragaman identitas senantiasa tiada terhindarkan dalam suatu peradaban bangsa. Multikulturalisme sendiri berarti “keberagaman budaya”, istilah yang acap digunakan untuk menggambarkan kondisi masyarakat yang terdiri dari banyak agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda.⁴⁴

Konsep multikulturalisme sendiri agak berbeda dengan pluralisme. Jika pluralisme menekankan keanekaragaman kebudayaan yang menempatkan masing-

masing entitas budaya itu sebagai sesuatu yang distingtif, multikulturalisme justru lebih menekankan relasi antar-kebudayaan dalam kerangka berpikir bahwa keberadaan suatu kebudayaan haruslah memikirkan juga keberadaan kebudayaan lainnya. Pemikiran seperti inilah yang melahirkan gagasan toleransi, kesetaraan, persamaan hak, saling menghormati, dan sebagainya.⁴⁵ Multikulturalisme selalu berbicara tentang bagaimana manusia bisa hidup bersama secara harmonis. Ia selalu tentang kemanusiaan—tentang beberapa kelompok manusia dan bagaimana mereka menjalani hidupnya dan siapa-siapa aja yang memungkinkan menjadi anggota kelompok mereka.⁴⁶

Wacana Dakwah Multikultural

Bukan tanpa alasan dakwah multikultural terus diwacanakan para pakar dan ilmuwan, khususnya sarjana-sarjana muslim. Agaknya ini dilandasi keyakinan bahwa kemajemukan atau multikulturalitas adalah fitrah manusia. Setiap manusia beragama umumnya punya keyakinan kalau Tuhan menyengaja menciptakan manusia dengan beragam jenis. Manusia tidak pernah diciptakan seragam; semuanya hidup dalam aneka jenis fisik, sifat dan identitas. Karena itu Tuhan memberi perintah untuk saling asah, asuh, dan asih di antara sesama manusia.⁴⁷ Dalam Islam, kemajemukan itu tertuang jelas dalam firman Allah Swt. yang berbunyi, “Wahai manusia! Sungguh, kami

⁴² Abdul Basit, *Filsafat dakwah* (Rajawali Pers, 2013), 175.

⁴³ Ali Aziz, *Ilmu Dakwah Edisi Revisi* (Prenada Media, 2024), 348.

⁴⁴ Prianto, “Komunikasi Dakwah Berbasis Multikultural dalam Perspektif Al-Qur’an.”

⁴⁵ Achmad Fedyani Syaifuddin, “Membumikan Multikulturalisme Di Indonesia,” *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI* 2, no. 1 (t.t.): 3–11.

⁴⁶ Dawn Zinga, *Navigating multiculturalism : negotiating change* (Cambridge Scholars Press, 2006), 106.

⁴⁷ Sri Ayu Rayhaniyah, *DAKWAH MULTIKULTURAL* (Media Sains Indonesia, 2020), 5.

telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”⁴⁸

Dakwah multikultural adalah sebuah usaha ajakan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat—sebagai penerima atau objek dakwah—dengan tulus dan ikhlas, namun juga mau mengakui dan menghargai perbedaan dalam kesederajatan untuk diri sendiri maupun orang atau kelompok lain.⁴⁹ Ini adalah ikhtiar kolektif demi mempertahankan sekaligus pula menyuburkan nilai kemanusiaan secara universal.⁵⁰ Maka, dalam dakwah multikultural selalu ada beban yang diemban—suatu kesadaran bahwa di masyarakat selalu ada kemajemukan dan keragaman budaya. Kesadaran inilah yang mengarahkan gerakan dakwah pada ortopraksis yang berdimensi etis.⁵¹

Islam adalah agama global, yang berarti ajarannya bersifat universal dan diturunkan untuk semua manusia tanpa terkecuali. Karena itulah dakwah multikultural akhirnya menjadi

keniscayaan. Prioritas utamanya adalah pada penyampaian pesan agama dalam konteks keragaman dengan cara mencari titik temu untuk hal-hal yang mungkin disepakati, dan mendorong pemakluman untuk hal-hal lain yang muskil disepakati. Ini sama sekali tidak mengurangi esensi Islam sebagai agama yang diturunkan untuk mewujudkan kebaikan pada peradaban manusia; Islam tetaplah digaungkan dalam rangka mengubah tradisi buruk menjadi tradisi baik, mengoreksi yang menyimpang menjadi sesuatu yang lurus. Hanya saja, segala perubahan sosial harus digapai melalui interrelasi dalam masyarakat.⁵² Seturut dengan itu, dakwah multikultural harus dikembangkan melalui dialog, sikap keterbukaan, dan berorientasi pemecahan masalah.⁵³

Dalam literatur lain, juga dikatakan bahwa dakwah multikultural perlu ditopang dengan menanamkan multikulturalisme itu sendiri kepada masyarakat. Dan upaya ini sebaiknya dilakukan dengan menghadirkan pengalaman multikultural—sebuah pengalaman yang dihasilkan dari interaksi satu individu dengan individu lain yang berbeda kebudayaan. Pengalaman multikultural ini, jika mengacu pada gagasan Zeynep Aytug, dapat pula dibentuk melalui dua hal:

⁴⁸ “Surah Al-Hujurat - 13,” Quran.com, diakses 8 Juni 2026, <https://quran.com/id/kamar-kamar/13>.

⁴⁹ Roib Santoso dkk., “Dakwah ‘Udeng Vs Teklek’: Studi Dakwah Multikultural Mbah Sholeh Semendi Winongan Pasuruan Indonesia,” *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2017): 77–104, <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i1.690>.

⁵⁰ Wahyu Budiantoro dan Khafidhoh Dwi Saputri, *Pengembangan Dakwah Multikultural Di Era Digital | ICODEV: Indonesian Community Development Journal*, 22 November 2021, <https://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/icodev>.

⁵¹ Tomi Hendra, “DAKWAH PADA MASYARAKAT MULTIKULTURAL,” *Hikmah* 14, no. 1 (2020): 1–14.

⁵² Zainol Huda, “DAKWAH ISLAM MULTIKULTURAL (Metode Dakwah Nabi SAW Kepada Umat Agama Lain),” *Religia* 19, no. 1 (2016): 89–112, <https://doi.org/10.28918/religia.v19i1.661>.

⁵³ Aris Kristianto dan Dedy Pradesa, “Landasan Dakwah Multikultural: Studi Kasus Fatwa MUI tentang Pengharaman Pluralisme Agama,” *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 2, no. 1 (2020): 153–78, <https://doi.org/10.55372/inteleksiapjipid.v2i1.96>.

eksposur multikultural dan interaksi multikultural. Eksposur multikultural berarti memaparkan kebudayaan asing atau orang lain melalui observasi, mempelajari bahasa, mengonsumsi produk budaya, dan hal-hal lain tanpa interaksi langsung. Sedangkan interaksi multikultural berarti terjadi kontak sosial dan komunikasi intens, sehingga yang dihasilkan bukan hanya kesepemahaman, tetapi juga memahami karakteristik perbedaan dan bagaimana menghadapinya secara inklusif.⁵⁴

Dalam konteks keindonesiaan, gagasan Aytug itu sudah terdapat manifestasinya sendiri dengan diusungnya kerjasama dan dialog antaragama. Hal tersebut adalah respons atas fenomena globalisasi yang semakin melesapkan sekat-sekat yang membatasi interaksi individu atau kelompok yang berbeda keyakinan selama ini.^{55,56}

Tinjauan Nilai Pancasila

Meskipun pengesahan Pancasila secara konstitusional dimulai sejak 18 Agustus 1945, banyak cendekiawan beranggapan proses konseptualisasinya sudah berlangsung jauh sebelum itu. Yudi Latif berteori bahwa konseptualisasi Pancasila melintasi sejarah panjang, dimulai sejak

fase “pembuahan” yang melibatkan berbagai gerakan nasional dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan serta sintesis antar ideologi; disusul fase perumusan dalam bentuk musyawarah dalam badan formal BPUPK hingga Panitia Sembilan; dan fase pengesahannya yang dilaksanakan dalam sidang PPKI.⁵⁷ Dengan begitu, aspek historis memang tidak bisa dilepaskan dalam upaya memahami Pancasila, terutama pergerakan dan pengumpulan pemikiran Soekarno sebagai tokoh sentralnya.⁵⁸

Menariknya, Soekarno sendiri tegas mengatakan bahwa ia bukanlah pencipta Pancasila, karena ia hanya menggali nilai-nilai Pancasila itu dari bumi pertiwi Indonesia.⁵⁹ Dan sejarah memang mencatat bahwa konseptualisasi Pancasila melibatkan partisipasi banyak pihak. Pancasila adalah karya bersama bangsa Indonesia setelah melalui pergulatan pemikiran, terutama antara kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler.⁶⁰ Namun pada akhirnya Pancasila tetap menjadi kontrak sosial, pemersatu, dan dasar negara bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶¹

Soekarno menyebut Pancasila pada dasarnya adalah *philosophische grondslag*

⁵⁴ Zeynep G. Aytug dkk., “Multicultural experience: Development and validation of a multidimensional scale,” *International Journal of Intercultural Relations* 65 (Juni 2018): 1–16, <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2018.04.004>.

⁵⁵ Hamdani Khaerul Fikri, “Dakwah Pada Masyarakat Multikultural,” *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 2 (2023): 129–41, <https://doi.org/10.20414/mudabbir.v4i2.9208>.

⁵⁶ Lihat juga Ismail Ismail dan Prio Hotman, *Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama Dan Peradaban Islam* (Kencana, 2013), 262–63.

⁵⁷ Yudi Latif, *Negara paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila* (Gramedia Pustaka Utama, 2011), 5–39.

⁵⁸ Lihat misalnya Peter Kasenda, *Bung Karno panglima revolusi* (Galangpress, 2014).

⁵⁹ Latif, *Negara paripurna*, 20.

⁶⁰ Perihal dinamika dan konflik kelompok nasionalis Islam dan nasionalis sekuler ini, lihat misalnya Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945: sebuah konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia (1945-1959)* (Gema Insani, 1997).

⁶¹ Ruslan, *Negara Madani: Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, 187.

bagi bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila ia maksudkan sebagai fundamen, filosofi, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, dan hasrat yang sedalam-dalamnya, yang di atasnya dibangun suatu negara Indonesia merdeka.⁶² Seturut dengan itu, Pancasila juga diharapkan menjadi *guidelines* sekaligus media pemersatu di antara masyarakat yang multietnis sekaligus multiideologi sehingga tercipta persatuan. Dari titik inilah menempatkan Pancasila sebagai *philosophische grondslag* atau pandangan hidup sehari-hari bagi setiap manusia Indonesia menjadi amat penting.⁶³ Pandangan ini senada dengan pandangan yang menyebut bahwa Pancasila bukan hanya ideologi nasional, tetapi mesti berkembang sebagai paradigma global.^{64,65} Sementara itu, Franz Magnis-Suseno menyebut Pancasila merupakan kerangka nilai sekaligus cita-cita luhur bangsa Indonesia.⁶⁶

Nikolaus Driyarkara lantas berargumen bahwa Pancasila harus ditekankan aspek kemanusiaannya. Baginya, Pancasila adalah tentang kodrat dan integritas kemanusiaan, yang kemudian mengerucut menjadi kelima sila—sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila

kerakyatan, dan sila keadilan sosial. Kelima sila itu adalah satu kesatuan, semuanya saling berhubungan dan kait mengait.⁶⁷ Pemahaman tentang kesatuan sila Pancasila juga datang dari Notonagoro, yang menyebut Pancasila bukan asas yang berdiri sendiri, karena ia memiliki kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis itu tiada lain adalah manusia yang punya hakikat mutlak monopluralis. Dengan demikian, ia berpandangan bahwa manusia, secara sejatinya, adalah sosok yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta yang berkeadilan sosial.^{68,69}

Pandangan terhadap Pancasila sebagai satu kesatuan nilai yang utuh dapat pula ditemukan dalam penjelasan Moh. Hatta. Menurutnya, Pancasila punya dua fondasi utama: fondasi moral dan fondasi politik. Yang menjadi fondasi moral Pancasila adalah sila ketuhanan, sedangkan keempat sila lainnya adalah fondasi politik. Fondasi moral (Ketuhanan yang Maha Esa) adalah sila yang akan membuat bangsa menjadi kokoh, lalu mengarahkan pada

⁶² Soekarno, *Tjampkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara* (Departemen Penerangan RI, 1964), 9.

⁶³ Ida Bagus Brata dan Ida Bagus Nyoman Wartha, "Lahirnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia," *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)* 7, no. 1 (2017): 120–32.

⁶⁴ Agus Wahyudi, "Ideologi Pancasila: Doktrin Yang Komprehensif Atau Konsepsi Politis?," *Jurnal Filsafat* 39, no. 1 (2006): 94–115.

⁶⁵ Soekarno sendiri pernah menawarkan Pancasila sebagai ideologi perdamaian dunia ke dunia internasional. Ia meyakini Pancasila adalah gagasan universal dan dapat menjadi solusi untuk mencegah terjadinya penjajahan terhadap suatu bangsa oleh bangsa lain. Ini ia sampaikan lewat pidatonya bertajuk "Build the World A New (Membangun Dunia

Kembali" dalam sidang PBB pada 30 September 1960. Lihat Darmansjah Djumala dan Yusa Djuyandi, "Bung Karno's Speech And Pancasila For World Peace," *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 8, no. 2 (2023): 206–12, <https://doi.org/10.24198/jwp.v8i2.49985>.

⁶⁶ Wahyudi, "Ideologi Pancasila: Doktrin Yang Komprehensif Atau Konsepsi Politis?"

⁶⁷ Lihat Nikolaus Driyarkara, *Karya lengkap Driyarkara: esai-esai filsafat pemikir yang terlibat penuh dalam perjuangan bangsanya* (Gramedia Pustaka Utama, 2006).

⁶⁸ Notonagoro, *Pancasila: secara ilmiah populer* (Bumi Aksara, 1997), 23.

⁶⁹ Lihat juga Kaelan, "Kesatuan Sila-Sila Pancasila," *Jurnal Filsafat* 1, no. 1 (2007): 42–52, <https://doi.org/10.22146/jf.31640>.

kebaikan, kejujuran, kebenaran, keadilan serta persaudaraan baik ke dalam maupun ke luar. Dengan adanya fondasi moral, juga fondasi politik yang punya dasar (asas), maka diharapkan bangsa Indonesia dapat menggapai apa yang menjadi cita-citanya.⁷⁰ Kelima sila dalam Pancasila tidak hanya menjadi dasar pembangunan negara, tetapi juga pembangunan manusia Indonesia itu sendiri. Kelima sila itu adalah kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain; hubungan kelimanya sangat erat, kait-mengait, dan berangkaian tidak berdiri sendiri.⁷¹

Dengan demikian, dapat kiranya dipahami bahwa Pancasila pada dasarnya adalah falsafah bangsa Indonesia. Maksudnya, ia adalah seperangkat nilai yang menjadi pedoman hidup manusia-manusia Indonesia. Sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial adalah norma umum dan universal yang dapat diterima semua elemen bangsa hingga akhirnya Pancasila dapat menjadi konsensus bersama. Maka, sesungguhnya kelima sila itu diyakini dapat menjadi kompas moral semua orang dan kelompok di Indonesia dalam konteks hidup berbangsa maupun bernegara.

Gagasan-Gagasan Dakwah Multikultural dalam Pancasila

1. Gagasan dalam Ketuhanan yang Berkebudayaan

Sila ketuhanan Pancasila tegas mengamanahkan agar setiap manusia

Indonesia seyogianya bertuhan. Nilai ketuhanan atau religiusitas adalah sumber etik sekaligus spiritualitas, dan ia bersifat vertikal-horizontal dan amat penting sebagai fundamen etika. Itulah kiranya yang ada dalam alam pemikiran Pancasila. Karena itulah Indonesia tidak bisa disebut sebagai negara sekuler yang mutlak memisahkan urusan negara dan agama. Bahkan, negara diharapkan tidak hanya melindungi agama, tetapi juga mengembangkannya dalam kehidupan masyarakat. Negara dan Pancasila tidak bermusuhan, tetapi keduanya justru saling melengkapi dalam suatu kesadaran yang saling menguatkan dan melahirkan keuntungan satu sama lain.⁷²

Tentu negara harus independen. Artinya secara politik ia tidak boleh didikte oleh agama itu sendiri.⁷³ Maka dengan begitu ia dapat melindungi semua agama. Jika merujuk gagasan Soekarno, maka beragamanya bangsa Indonesia hendaklah dengan saling menghargai. Tidak boleh ada egoisme dalam kehidupan agama masyarakat Indonesia. Inilah yang ia sebut sebagai "Ketuhanan yang Berkebudayaan." Bagi sang proklamator, sikap ketuhanan harus dengan berbudi luhur; orang beragama harus menghormati mereka yang beragama lain.⁷⁴ Hal serupa dapat pula ditilik pada pemikiran Ki Bagus Hadikusumo yang menganggap agama adalah roh dan spirit dalam penyelenggaraan negara, tetapi tetap harus ada jaminan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing.⁷⁵

⁷⁰ Mohammad Hatta, *Demokrasi kita* (Pustaka Antara, 1966), 30–31.

⁷¹ Mohammad Hatta dkk., *Uraian Pancasila* (Penerbit Mutiara, 1984), 19.

⁷² aqil Teguh Fathani Dan Zuly Qodir, "Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam

Lahirnya Pancasila," *Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 117–28, <https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.828>.

⁷³ Latif, *Negara paripurna*, 42.

⁷⁴ Soekarno, *Tjampkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*, 29–30.

⁷⁵ Qisthi Faradina Ilma Mahanani, "Pemikiran Ki Bagus Hadikusuma Tentang Islam Dan Negara Dalam

Pancasila terang sekali menghendaki bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bertuhan dan hidup dengan ajaran-ajaran Tuhan atau agama. Dengan kata lain, bangsa Indonesia harus menjadi bangsa yang religius. Dengan bertuhan, maka Indonesia dapat mencapai kebaikan sekaligus kebajikan.⁷⁶ Inilah alasan kenapa Indonesia tidak bisa hanya disebut *nation-state*, karena yang lebih tepat adalah *religious nation-state*. Artinya, benar belaka bahwa Indonesia bukan negara agama, tetapi harus diingat bahwa Indonesia adalah negara yang masyarakat-bangsanya beragama.⁷⁷

Di dalam sila ketuhanan ada sifat vertikal, karena sila ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan-nya. Ini berbeda dengan keempat sila lain yang bersifat horizontal karena mengatur tentang hubungan sesama manusia. Apabila dibaca dari perspektif Islam, maka keempat sila setelah sila ketuhanan pada dasarnya adalah konsekuensi logis keagamaan, atau konsekuensi logis manakala seseorang sudah memiliki kesadaran akan kebutuhannya yang Maha Esa.⁷⁸ Ketuhanan adalah sari pati Pancasila, dan ia harus dipraksiskan dalam kerja-kerja kemanusiaan hingga menuju keadilan sosial.⁷⁹

Demikianlah, sila ketuhanan memiliki makna penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Ia membawa amanah “sakral” agar agama benar-benar ditegakkan. Pemahaman ini tentu juga memiliki makna penting bagi dakwah sekaligus pula

multikulturalisme. Dengan begitu, Pancasila tentu tidak anti terhadap dakwah. Bahkan, dengan adanya sila ketuhanan ini, yang berorientasi pada pembentukan bangsa yang religius, Pancasila tentu memberi ruang seluas-luasnya untuk pengembangan dakwah. Sebab, sebagaimana telah banyak disinggung, dakwah adalah upaya transformasi Islam (sebagai agama) menuju tatanan individu, keluarga, masyarakat, maupun bangsa yang sesuai dengan ajaran Tuhan. Dakwah adalah jalan untuk membentuk fondasi moral Pancasila yang tiada lain adalah sila ketuhanan itu sendiri.

Kemudian, percikan-percikan multikulturalisme pun dapat ditemukan pada sila ketuhanan ini—termasuk kaitannya dengan dakwah. Terlepas bahwa Pancasila memberi ruang pada dakwah, tapi jangan lupa bahwa prinsip berkebudayaan dalam sila ketuhanan juga mengamankan sikap toleransi dan menghormati mereka yang berbeda agama. Semangat menegakkan agama tidak boleh bersanding dengan sikap egoisme agama. Maka, inilah ajaran multikulturalisme paling utama dalam sila pertama Pancasila. Artinya, meskipun menghidupkan ajaran Tuhan dan agama adalah yang utama, menghargai dan menghormati agama lain juga utama. Dalam hal ini, cita-cita dakwah dan paham multikulturalisme berdiri sama tinggi. Ini adalah salah satu hal substansi dalam gagasan dakwah multikultural. Dalam konteks kontemporer di mana kompetisi

Perumusan Dasar Negara Indonesia (1945-1953),” *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 1, no. 2 (2020): 1–14, <https://doi.org/10.24042/jhcc.v1i2.6517>.

⁷⁶ Soekarno, *Tjampakan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*, 93.

⁷⁷ Zuly Qodir, “Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama,” *Jurnal Studi Pemuda* 5, no. 1

(2018): 429–45, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>.

⁷⁸ Nurcholish Majid, *Cita-cita politik Islam era reformasi* (Paramadina, 1999), 83–84.

⁷⁹ Syaiful Arif, *Falsafah Kebudayaan Pancasila* (Gramedia Pustaka Utama, 2016), 60–61.

dan persaingan dakwah semakin tak terhindarkan, maka gagasan ini semakin menemukan relevansinya. Nilai ketuhanan yang membawa konsep kebudayaan ini akan membuat persaingan tetap sehat dengan sikap saling menghormati, sehingga tidak berujung pada konflik.⁸⁰

Selanjutnya, dapat pula ditemukan hal substansi lain tentang dakwah multikultural dalam sila ini, khususnya berkenaan dengan prinsip menegakkan Islam yang tidak mengarah pada institusionalisasi agama. Dakwah multikultural, sebagaimana telah disinggung, lebih mengedepankan pendekatan kebudayaan dalam mengubah masyarakat, bukan melembagakan agama melalui *daulah* Islam. Formalisasi syariat tidak lebih penting daripada “membumikan” syariat itu sendiri dalam kehidupan masyarakat. Maka, ini pula yang menonjol dalam alam pemikiran Pancasila. Konsensus politik bangsa Indonesia ini mendambakan suatu bangsa-negara yang hidup dengan nilai-nilai agama tanpa harus menyeretnya menjadi negara agama. Ini adalah buah perjuangan pendiri bangsa—termasuk intelektual-intelektual muslim di dalamnya. Tokoh-tokoh Islam memang gagal memformalkan Islam sebagai dasar negara dalam sidang BPUPK hingga PPKI, tapi harus diingat bahwa mereka telah berhasil menyelamatkan Indonesia dari bentuk negara sekuler.⁸¹

Hal lain yang tak kalah penting tentang percikan gagasan dakwah multikultural dalam Pancasila adalah betapa falsafah ini amat menekankan pentingnya praksis atas suatu keyakinan agama. Keyakinan terhadap Ketuhanan yang Maha Esa haruslah diwujudkan dalam pengamalan, terutama melalui sila-sila setelah sila ketuhanan.⁸² Ini karena Pancasila percaya bahwa setiap agama pasti mengajarkan kebaikan, dan karena itu setiap orang beragama harus bersungguh-sungguh dengan agama yang diimaninya.⁸³ Pancasila meyakini bahwa ada ajaran-ajaran yang sifatnya universal dari agama-agama yang ada dan itu dapat diterima semua orang. Dalam perspektif dakwah multikultural, inilah yang dimaksud “kualitas lebih penting dari kuantitas.” Yang lebih ditekankan dan menjadi tujuan dakwah adalah bagaimana meningkatkan kualitas peradaban umat dengan berbagai kebaikan yang diajarkan Islam, termasuk dalam hal kesejahteraan, keadilan, perlindungan hak, dan lain sebagainya. Apabila kuantitas umat Islam bertambah lantaran kebaikan-kebaikan Islam, maka itu adalah efek samping dari tujuan dakwah.⁸⁴ Tapi pada intinya mendakwahkan Islam tidak harus dengan mengajak orang untuk masuk agama Islam.

⁸⁰ Anggit Rizkianto, “Falsafah Pancasila Sebagai Basis Pengembangan Dakwah Islam,” *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 3, no. 2 (2022): 69–94, <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.53200>.

⁸¹ Muhamad Hisyam, “Ki Bagus Hadikusumo Dan Problem Relasi Agama-Negara,” *Jurnal Masyarakat & Budaya* 13, no. 2 (2011): 1–28.

⁸² Arif, *Falsafah Kebudayaan Pancasila*, 60.

⁸³ Ini sebagaimana penjelasan Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPK. Soekarno berujar, “Yang Kristen menyembah Tuhan

menurut petunjuk Isa al Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad S.A.W, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya.” Lihat Sekretariat Negara Republik Indonesia, “Risalah Sidang BPUPKI-PPKI,” 1945, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/RisalahSidangBPUPKI-PPKI-UUD1945.pdf>.

⁸⁴ Usfiyatul Marfu’ah, “Strategi Komunikasi Dakwah Berbasis Multikultural,” *Islamic Communication Journal* 2, no. 2 (2018): 147, <https://doi.org/10.21580/icj.2017.2.2.2166>.

2. Gagasan dalam Kemanusiaan

Ajaran kemanusiaan dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab pada dasarnya adalah gagasan humanisme yang bersifat universal. Namun, sebagai salah satu fondasi politik—yang fondasi moralnya adalah sila ketuhanan—sila kemanusiaan ini tetap punya corak teologis. Menurut alam pemikiran Pancasila, kemanusiaan yang ideal adalah kemanusiaan yang digali dari hukum Tuhan, meskipun ia juga tetap bisa digali dari hukum alam dan sifat-sifat sosial manusia—semuanya itu dapat menjadi aspek fundamental etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam pergaulan global.⁸⁵

Manusia pasti memiliki rasa, cipta, dan karsa selaku makhluk yang berbudaya dan beradab. Itulah yang ditekankan sila kemanusiaan.⁸⁶ Atas dasar itu, mutlak adanya pengakuan terhadap harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia, yang muaranya adalah perlakuan adil kepada semua orang sebagaimana ajaran Tuhan. Nilai adil, sekaligus pula beradab, adalah landasan etis dalam memperjuangkan kemanusiaan.⁸⁷ Dan sebagai sesuatu yang universal, kemanusiaan itu akan mendorong siapa pun untuk berbuat baik atas dasar kemanusiaan. Konsekuensinya, kebaikan akan mudah dilakukan tanpa dibatasi sekat-sekat identitas baik itu ras, suku, bangsa, maupun agama. Kemanusiaan, pada titik tertentu, juga

akan mendorong siapa pun menjadi altruis.⁸⁸

Dalam pandangan Islam, kemanusiaan adalah sesuatu yang amat dijunjung tinggi. Sebagai risalah profetik, Islam adalah ajaran yang menyeru pada persaudaraan sesama umat manusia tanpa memandang identitas apa pun.⁸⁹ Di mata Islam semua manusia adalah sama, dan yang membedakan di sisi Tuhan hanyalah ketakwaan (Q.S. al-Hujurat: 13). Tak ada satu pun orang, kelompok, bahkan bangsa mana pun di dunia yang bisa mengaku sebagai pihak yang paling dimuliakan Tuhan. Karena itulah sila kemanusiaan dalam perspektif Islam dapat dibaca sebagai risalah egalitarianisme, suatu perintah untuk membangun relasi-relasi manusiawi; menjalin kerjasama demi mencapai kesatuan kemanusiaan—karena semua manusia berasal dari Sang Pencipta dan nenek moyang yang sama.⁹⁰ Dengan kata lain, Pancasila secara teologis-filosofis membawa sebuah konsekuensi: ketika seseorang sudah berketuhanan dengan baik (*hablun min Allah*) maka itu akan mendorong kesalehan sosial dalam bentuk relasi sosial-horizontal dalam kemanusiaan (*hablun minal-nas*).⁹¹

Dalam perspektif dakwah multikultural pun kemanusiaan adalah sesuatu yang esensial. Bahkan pendekatan dakwah ini memang membawa misi menyuburkan

⁸⁵ Ruslan, *Negara Madani: Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, 196.

⁸⁶ Soejadi, *Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia* (Lukman Offset, 1999), 89.

⁸⁷ Latif, *Negara paripurna*, 43.

⁸⁸ Anggit Rizkianto, *Relasi Agama dan Pancasila: Mengukuhkan Karakter Kebangsaan* (Pustaka Aksara, 2021), 160–61.

⁸⁹ Zakiyuddin Baidhaw, "Pancasila Tauhid Sosial dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara," *Maarif* 11, no. 1 (2016): 41–78.

⁹⁰ Zakiyuddin Baidhaw, "Piagam Madinah dan Pancasila: Prinsip-Prinsip Kehidupan Bersama dalam Berbangsa dan Bernegara," dalam *Fikih Kebinekaan* (Mizan Pustaka, 2015), 127.

⁹¹ Baidhaw, "Piagam Madinah dan Pancasila: Prinsip-Prinsip Kehidupan Bersama dalam Berbangsa dan Bernegara," 158.

nilai kemanusiaan secara universal.⁹² Dan misi itulah yang mendasari prinsip inklusivitas dalam dakwah multikultural, yang dibangun dengan semangat humanitas dan universalitas Islam. Humanitas dalam konteks ini adalah sebuah keyakinan bahwa Islam adalah agama kemanusiaan, dan cita-cita Islam satu tarikan napas dengan cita-cita kemanusiaan (humanisme) secara umum. Ini dibuktikan dengan misi yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang notabenenya adalah menjadi rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan li al-'alamin*). Maka, kiranya jelas bahwa gerakan dakwah atau transformasi Islam tidak boleh hanya memberi keuntungan pada komunitas Islam saja, tetapi harus pada siapa pun tanpa terkecuali.⁹³ Apabila Soekarno punya "internasionalisme" sebagai bahasa politik yang menggambarkan cita-citanya tentang persahabatan bangsa-bangsa dan ketertiban dunia, maka dakwah multikultural menggunakan *ukhuwah basyariah* sebagai bahasa agama untuk melukiskan persaudaraan atas dasar kemanusiaan di hadapan Tuhan.

Dengan demikian, kiranya dapat dibayangkan betapa sila kemanusiaan sangat mendorong persaudaraan tanpa sekat identitas. Dalam konteks kehidupan beragama, ia mendorong pada pembangunan relasi lintas agama, golongan, maupun kelompok, yang tidak hanya dalam ruang lingkup nasional, tetapi juga dunia. Di sinilah letak percikan gagasan dakwah multikultural dalam sila kedua Pancasila ini pada ranah praksis. Dialog antaragama atau kerjasama antargolongan dapat dibentuk dengan semangat kemanusiaan. Meminjam istilah yang diusung Zeynep Aytug, nilai

kemanusiaan tidak hanya mendorong eksposur multikultural, tetapi juga interaksi multikultural. Begitu pula dengan literasi multikulturalisme untuk menguatkan pendekatan dakwah ini, nilai-nilai kemanusiaan tentu dapat membuatnya semakin mangkus. Jika Pancasila—dengan nilai-nilai kemanusiaannya—bergerak ke ranah global sebagai paham yang universal, maka ajaran Islam yang diemban dakwah multikultural juga bergerak ke arah yang sama.

Sebagaimana telah diungkap para pakar, pendekatan dakwah multikultural kini tidak lagi berorientasi pada islamisasi, tetapi lebih pada peningkatan kualitas peradaban. Dakwah seharusnya dapat memicu kerjasama dan sinergitas segenap elemen bangsa, kemudian bahu-membahu bersama bangsa lain dalam rangka menyelesaikan problem-problem kemanusiaan. Atas dasar itu, kini dakwah tak bisa lagi hanya dimaknai sebagai penyampaian ajaran Islam, tetapi juga harus ada aksi nyata, yang memberi bukti bahwa dakwah punya kemampuan memberi solusi atas permasalahan sosial yang terjadi.⁹⁴ Singkatnya, dakwah harus berdampak, tidak hanya pada masyarakat-bangsa, tetapi juga pada dunia. Gagasan semacam inilah yang juga menjadi prinsip Pancasila jika kita menyelisik fondasi politiknya yang paling jauh. Oleh karenanya Soekarno pernah mengatakan, "Tiada manusia dapat berdiri sendiri, manusia adalah satu makhluk masyarakat, manusia adalah suatu *homo socius*. Demikian pula bangsa tidak dapat hidup sendiri, bangsa hanyalah dapat hidup di

⁹² Budiantoro dan Saputri, *Pengembangan Dakwah Multikultural Di Era Digital* | ICODEV.

⁹³ Abidin, "Teologi Inklusif Nurcholish Madjid."

⁹⁴ Rayhaniyah, *DAKWAH MULTIKULTURAL*, 37.

dalam masyarakat umat manusia, di dalam masyarakatnya bangsa-bangsa.”⁹⁵

3. Gagasan dalam Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial

Pancasila tentu tidak hanya mengharapkan terbentuknya perdamaian, ketertiban, dan persatuan manusia-manusia di dunia. Hal yang sama juga harus terbentuk di bumi Indonesia sendiri. Bahkan, bangsa Indonesia harus kokoh di dalam terlebih dahulu sebelum menggaungkan pentingnya kekokohan antarbangsa di dunia. Keduanya sama penting, dan keduanya saling berkesinambungan. “Nasionalisme hanya dapat subur di dalam taman sarinya internasionalisme. Internasionalisme hanya dapat subur jikalau berakar di buminya nasionalisme,” kata Soekarno.⁹⁶

Sila persatuan Indonesia atau nasionalisme mengamankan agar Indonesia punya visi kebangsaan, yang didasari oleh cinta kepada tanah air dan masyarakat-bangsanya sendiri. Visi kebangsaan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyatuan kemajemukan identitas masyarakat ke dalam suatu komunitas politik bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai alat mempertahankan kemajemukan itu sendiri. Kemajemukan atau kebinekaan Indonesia bersumber dari kebudayaan yang sudah mengakar kuat, dan Indonesia tidak boleh tercerabut dari akar itu. Yudi Latif berargumen bahwa kebangsaan Indonesia menyerupai perspektif etnosimbolis yang menyatukan dua perspektif: perspektif modernis yang

mendorong kebaruan dan perspektif primordialis-perenialis yang mempertahankan eksistensi unsur-unsur lama.⁹⁷ Meski begitu, nasionalisme Indonesia tetaplah tidak berdiri sendiri. Ia tetap dijiwai nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan agar tidak berkembang menjadi nasionalisme sempit atau nasionalisme buta yang acap disebut chauvinisme.

Sementara itu, Notonagoro berpandangan bahwa konsep persatuan Indonesia adalah kesatuan kemajemukan tunggal yang dibangun melalui beberapa hal, mulai kesamaan sejarah, wilayah, nasib, kebudayaan, dan termasuk di dalamnya adalah kerohanian.⁹⁸ Dan gagasan seperti ini bukanlah hal baru dalam Islam. Dalam perspektif Islam, *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa) sama pentingnya apabila dibandingkan dengan *ukhuwah basyariyah* atau *ukhuwah Islamiyah* sekalipun.⁹⁹ Persaudaraan atau persatuan sesama muslim biasanya dikenal dengan istilah jemaah, namun jemaah di sini sebenarnya mengandung makna lebih dari sekadar kumpulan orang Islam. Jemaah adalah komunitas yang punya kesadaran terstruktur dan terpola lantaran adanya kepemimpinan, aturan, dan visi, yang membuat semua bergerak ke arah yang sama.¹⁰⁰ Lalu, kebangsaan atau nasionalisme sendiri juga bukan sesuatu yang asing dalam khazanah keislaman. Meskipun Islam tidak mengenal istilah nasionalisme secara lateral, tetapi di Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang

⁹⁵ Soekarno, *Tjaman Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*, 120.

⁹⁶ Soekarno, *Tjaman Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*, 134.

⁹⁷ Latif, *Negara paripurna*, 44–45.

⁹⁸ Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia* (Paradigma, 2009), 187.

⁹⁹ Azhar Azhar, “Sejarah Dakwah Nabi Muhammad Pada Masyarakat Madinah: Analisis Model Dakwah Ukhuwah Basyariah Dan Ukhuwah Wathaniyah,” *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 1, no. 2 (2017): 257–76, <https://doi.org/10.30829/j.v1i2.1203>.

¹⁰⁰ Masdar F. Mas'udi, *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam* (Pustaka Alvabet, 2010), 30.

sebenarnya menerangkan tentang itu.¹⁰¹ Oleh sebab itu, dalam gagasan multikultural, penanaman kecintaan terhadap negara dan tanah air juga diperlukan, dan ini pun juga dilakukan Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah.¹⁰²

Dalam konteks kehidupan beragama, sila persatuan tentu mendorong pada terbangunnya kohesi sosial yang kuat di antara umat beragama, baik di antara yang berbeda agama maupun yang berbeda golongan/ kelompok dalam satu agama. Sebab, multikulturalisme dalam kehidupan agama di Indonesia telah menjadi fakta keras (*hard fact*)¹⁰³. Maka, orang-orang yang berasal dari berbagai latar belakang berbeda perlu untuk diketemukan dan diperkuat kesamaannya, dan perihal perbedaan tidak perlu ditekankan apalagi dilebih-lebihkan.¹⁰⁴ Prinsip yang sama pun terdapat dalam gagasan dakwah multikultural, bahkan salah satu prinsip utama dalam mempraktikkan pendekatan dakwah ini adalah berusaha mencari titik temu untuk hal-hal yang mungkin disepakati, tetapi juga maklum untuk hal-hal yang muskil untuk itu. Lebih-lebih jika hal yang tidak bisa disepakati tersebut menyangkut persoalan *furu'iyah*.

Mengedepankan kesamaan/ titik temu dan memaklumi perbedaan ini dapat pula ditemukan ajarannya dalam sila kerakyatan. Harus diingat bahwa sila keempat yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat-kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" adalah ajaran politik demokratis. Daulat rakyat adalah harga mati dalam iklim politik Indonesia. Namun, harus diingat juga bahwa demokrasi dalam gagasan Pancasila punya identitasnya sendiri, yang tidak mengikuti arus demokrasi liberal maupun demokrasi totaliter, karena demokrasi di sini harus terintegrasi dengan nilai-nilai yang berasal dari sila lain dalam Pancasila.¹⁰⁵ Demokrasi, dalam ajaran Pancasila, bukanlah tujuan melainkan hanya alat. Setiap keputusan politik mesti diambil berdasarkan musyawarah dengan hikmat-kebijaksanaan.¹⁰⁶

Sebagai konsep politik, demokrasi Pancasila tetap memberi ruang yang luas bagi partisipasi politik masyarakat. Oleh karena itu, dakwah pun pada akhirnya mendapat ruang yang luas pula, termasuk dakwah struktural. Dakwah struktural, sebagaimana telah disinggung, adalah dakwah yang diperjuangkan lewat kekuasaan, yang perlu melibatkan aktor-

¹⁰¹ Beberapa nilai-nilai yang menyangkut nasionalisme dan cinta tanah air yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah: (1) nilai persatuan dan kesatuan, terdapat dalam Q.S. Al Anbiya':92, Q.S. Al Hujurat:13, Q.S. Ali Imron:103, dan Q.S.As Shaff: 4 (2) nilai rela berkorban, terdapat dalam Q.S. Al Anfal:60, Q.S. Qashsas:7, dan Q.S. An Nisa':135 (3) nilai kesetiaan, terdapat dalam Q.S. An Nisa':59, dan Q.S. Ali Imron:103 (4) nilai taat terhadap peraturan perundang-undangan, terdapat dalam Q.S. An Nisa':59, dan Q.S. An Nisa':135 (5) nilai toleransi antarumat beragama terdapat dalam Q.S. Al Mumtahanah:8, dan Q.S. Al An'am:108. Lihat M. Alifudin Ikhsan, "NILAI - NILAI CINTA TANAH AIR DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2017): 108-14.

¹⁰² Rayhaniyah, *Dakwah Multikultural*, 71.

¹⁰³ Istilah ini merujuk pada Sartono Kartodirdjo (1992). Maksud dari "fakta keras" adalah fakta yang tidak perlu lagi dipertanyakan kebenarannya. Ini berkebalikan dari dari fakta lunak (*soft fact*) yang masih bisa dipertanyakan melalui sumber-sumber data baru. Lihat Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah* (Gramedia Pustaka Utama, 1992).

¹⁰⁴ Azyumardy Azra, "Cultural Pluralism In Indonesia: Continuous Reinventing of Indonesian Islam in Local, National and Global Contexts," *Asia-Pacific Journal on Religion and Society* 2, no. 2 (2019): 56-60, <https://doi.org/10.24014/apjrs.v2i2.6399>.

¹⁰⁵ Mohammad Hatta, *Tanggung Jawab Moril Kaum Inteligensia* (Fasco, 1957), 34-35.

¹⁰⁶ Latif, *Negara paripurna*, 43.

aktor politik di dalamnya demi memengaruhi keputusan politik agar tercipta kehidupan bernegara yang lebih bermartabat. Dalam hal ini demokrasi Pancasila menjadi arena yang terbuka untuk itu, namun catatan pentingnya adalah perjuangan penegakkan Islam harus dengan musyawarah mufakat yang penuh hikmat. Artinya, alih-alih adu kekuatan politik secara bebas, yang lebih ditekankan adalah dialog, mencari kesepahaman dan kesepakatan bersama. Harus ada semangat gotong royong ketika sistem politik kerakyatan ini ditegakkan di Indonesia. Dengan demikian, demokrasi Pancasila dapat menjadi ruang aman bagi keanekaragaman; ia menjadi wadah hidupnya multikulturalisme di ranah politik. Di sinilah letak gagasan dakwah multikultural ketika penegakkan Islam diperjuangkan lewat kekuasaan.

Selanjutnya, saat kita sudah memahami bahwa sila kerakyatan adalah konsep politik yang menyimpan ajaran dakwah multikultural, maka sila keadilan sosial adalah konsep yang menjamkannya. Keadilan sosial, sebagai sila pamungkas Pancasila, adalah tujuan atau cita-cita dari pengamalan keempat sila sebelumnya. Perwujudannya adalah tatanan masyarakat yang adil sekaligus makmur. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah “sikap” sekaligus cita-cita mulia para pendiri bangsa.¹⁰⁷ Artinya, Indonesia memang negara demokrasi, tetapi demokrasi itu harus mengarah pada perbaikan kualitas hidup manusia-

manusia Indonesia. “Apabila kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup,” demikian kata Soekarno. Sang proklamator juga menekankan pentingnya prinsip kesejahteraan yang menjadi jiwa dari sila keadilan sosial. Baginya, prinsip kesejahteraan adalah tidak adanya kemiskinan di dalam Indonesia merdeka.¹⁰⁸ Sementara Kasman Singodimedjo, tokoh Islam yang juga terlibat dalam pengesahan Pancasila, mengungkapkan bahwa keadilan sosial adalah suasana masyarakat di mana anggota-anggotanya berkemakmuran yang adil dan membahagiakan. Baginya, keadilan itu mesti ditegakkan atas dasar perintah Tuhan, dengan begitu keadilan itu nantinya akan menghasilkan kebahagiaan sekaligus ketentraman.¹⁰⁹ Ia lantas menamsilkan Indonesia sebagai sebuah kapal yang sedang berlayar di samudra luas, dan kapal ini harus menuju pulau tujuan: keadilan sosial. Di sanalah terdapat kemakmuran yang merata adil, dan tiada penindasan berupa apa pun.¹¹⁰

Apabila kembali pada gagasan dakwah multikultural yang lebih berorientasi pada kualitas umat, kita akan menyadari betapa Pancasila juga punya orientasi serupa. Sebagai falsafah yang fondasinya adalah ketuhanan, Pancasila mencita-citakan suatu peradaban bangsa yang bermartabat di segala sisi. Karena itulah “keadilan sosial” tetap harus berada dalam kerangka “Ketuhanan yang Maha Esa”.¹¹¹ Dalam perspektif agama, inilah yang

¹⁰⁷ Ruslan, *Negara Madani: Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, 211.

¹⁰⁸ Soekarno, *Tjamkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*, 27.

¹⁰⁹ David Efendi dan Mu'arif, “Islam dan Pancasila: Pandangan Politik Kenegaraan Kasman Singodimedjo,” dalam *Nasionalis Tulen Singa Podium Kasman Singodimedjo: Pemikiran Dan Pergerakan* (Jusuf

Kalla School Of Government(Jksg), Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020).

¹¹⁰ Singo Singodimedjo, *Renungan Dari Tahanan* (Permata, 1967), 34.

¹¹¹ Efendi dan Mu'arif, “Islam dan Pancasila: Pandangan Politik Kenegaraan Kasman Singodimedjo.”

dimaksud bagaimana dakwah akan mengarahkan pada tatanan masyarakat ideal dalam rangka mewujudkan *Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur* (bangsa yang baik yang berada dalam *ridla* Allah). Upaya ini selalu dimulai dari perbaikan akidah dan etika pada setiap manusia di dalam bangsa tersebut. Sebab, dari setiap manusia paripurna (*insan kamil*) akan lahir masyarakat yang paripurna pula. Gambaran bangsa semacam ini sudah ditunjukkan dalam periode masyarakat Islam pertama yang diwujudkan melalui pemerintahan Nabi Muhammad SAW.¹¹²

Demikianlah, baik dalam sila persatuan, kerakyatan, maupun keadilan sosial, ketiganya mengandung percikan-percikan gagasan dakwah multikultural. Dan secara tidak langsung dakwah multikultural sesungguhnya dapat membantu mewujudkan gambaran ideal peradaban dalam alam pemikiran Pancasila, sehingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak hanya menjadi truisme semata—lantaran tiadanya langkah konkret perwujudannya dalam kenyataan.

Simpulan

Melalui kajian ini, ajaran-ajaran dakwah multikultural dapat ditemukan dalam Pancasila yang merupakan falsafah kebangsaan Indonesia. Namun, dakwah multikultural dalam falsafah Pancasila hanyalah berupa percikan-percikan

gagasan. Artinya Pancasila tidak secara tegas dan konkret berbicara tentang hal itu. Ini karena Pancasila merupakan konsep politik, bukan konsep keagamaan. Akan tetapi, setidaknya dapat dipahami bahwa sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial memberi ruang begitu besar bagi dakwah dan multikulturalisme. Kelima sila itu mengamanahkan tentang penguatan agama sekaligus toleransi; persaudaraan atau persatuan, baik itu sesama manusia maupun sesama warga bangsa; kerja sama dan bermusyawarah-mufakat; serta mewujudkan kesejahteraan umat/masyarakat.

Apa yang dihasilkan studi ini kiranya dapat menjadi modal penting untuk membangun sinergitas antara gerakan dakwah dan penguatan multikulturalisme dalam konteks keindonesiaan. Ini karena kehidupan beragama senantiasa bergerak dinamis, sedangkan kebinekaan adalah fakta yang tidak bisa ditepis. Dakwah akan selalu ada, dan gerakannya akan terus mengikuti arus zaman, sehingga penting untuk terus membicarakannya dalam kerangka kebangsaan agar lahir gagasan-gagasan inklusif dan membawa maslahat bagi semua.

¹¹² Rayhaniyah, *Dakwah Multikultural*, 70.

Bibliografi

- Abidin, Zainal. "Teologi Inklusif Nurcholish Madjid: Harmonisasi Antara Keislaman, Keindonesiaan, dan Kemoderenan." *Humaniora* 5, no. 2 (2014): 665. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3123>.
- Ahmad, Amrullah. "Konstruksi Keilmuan Dakwah dan Pengembangan Jurusan-Konsentrasi Studi." *Pengembangan Keilmuan Dakwah dan Prospek Kerja* (Semarang), 20 Desember 2008.
- Aini, Qorry, Fina Auliya Rizqi, Rona Nur Laila, dkk. "Konstruksi Dakwah Multikultural di Tengah Keragaman Budaya Lokal: Studi Pemikiran Gus Mus." *AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought* 1, no. 1 (2026): 29–41.
- Alian, Alian. "Metodologi Sejarah Dan Implementasi Dalam Penelitian." *Jurnal Pendidikan Dan Kajian Sejarah (Criksetra)* 2, no. 2 (2012). <https://repository.unsri.ac.id/22614/>.
- Anshari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945: sebuah konsensus nasional tentang dasar negara Republik Indonesia (1945-1959)*. Gema Insani, 1997.
- Arif, Syaiful. *Falsafah Kebudayaan Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Arif, Syaiful. "Menjernihkan Religiusitas Pancasila." *Kompas.id*, 5 Agustus 2022. <https://www.kompas.id/artikel/menjernihkan-religiusitas-pancasila>.
- Aytug, Zeynep G., Mary C. Kern, dan Stephan Dilchert. "Multicultural experience: Development and validation of a multidimensional scale." *International Journal of Intercultural Relations* 65 (Juni 2018): 1–16. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2018.04.004>.
- Ayunda, Aretsa Zana, Santi Mahmuda Urbaningkrum, Afaf Wafiqoh Nusaibah, Widya Septiana, Saesari Salekhah Nur Widyani, dan Arief Rahman H. "Tantangan Multikulturalisme di Indonesia: Menyoal Relasi Agama dan Ruang Publik." *ALSYS* 2, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.58578/alsys.v2i1.138>.
- Azhar, Azhar. "Sejarah Dakwah Nabi Muhammad Pada Masyarakat Madinah: Analisis Model Dakwah Ukhuwah Basyariah Dan Ukhuwah Wathaniyah." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 1, no. 2 (2017): 257–76. <https://doi.org/10.30829/j.v1i2.1203>.
- Aziz, Ali. *Ilmu Dakwah Edisi Revisi*. Prenada Media, 2024.
- Azra, Azyumardy. "Cultural Pluralism In Indonesia: Continuous Reinventing of Indonesian Islam in Local, National and Global Contexts." *Asia-Pacific Journal on Religion and Society* 2, no. 2 (2019): 56–60. <https://doi.org/10.24014/apjrs.v2i2.6399>.
- Baidhaw, Zakiyuddin. "Pancasila Tauhid Sosial dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara." *Maarif* 11, no. 1 (2016): 41–78.
- Baidhaw, Zakiyuddin. "Piagam Madinah dan Pancasila: Prinsip-Prinsip Kehidupan Bersama dalam Berbangsa dan Bernegara." Dalam *Fikih Kebinekaan*. Mizan Pustaka, 2015.
- Basit, Abdul. *Filsafat dakwah*. Rajawali Pers, 2013.
- Bisri, Achmad. "Islam Rahmatan Li 'L-Ālamīn Sebagai Landasan Dakwah Multikultural: Perspektif Muhammad Fethullah Gülen." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 2 (2014): 479–94. <https://doi.org/10.21580/ws.22.2.290>.
- Brata, Ida Bagus, dan Ida Bagus Nyoman Wartha. "Lahirnya Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia." *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)* 7, no. 1 (2017): 120–32.
- Budiantoro, Wahyu, dan Khafidhoh Dwi Saputri. *Pengembangan Dakwah Multikultural Di Era Digital | ICODEV: Indonesian Community Development Journal*. 22 November 2021. <https://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/icodev>.
- Daing, Karina Radhiatun, Muh Alghifari, Siti Ainun Juniarti Azis, dan Kurniati. "Propaganda Digital Dan Distorsi Jihad: Tantangan Pencegahan Radikalisme Di Indonesia." *Al-Ilmiya: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 4 (2026): 1855–63.

- Djumala, Darmansjah, dan Yusa Djuyandi. "Bung Karno's Speech And Pancasila For World Peace." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 8, no. 2 (2023): 206–12. <https://doi.org/10.24198/jwp.v8i2.49985>.
- Driyarkara, Nicolaus. *Karya lengkap Driyarkara: esai-esai filsafat pemikir yang terlibat penuh dalam perjuangan bangsanya*. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Efendi, David, dan Mu'arif. "Islam dan Pancasila: Pandangan Politik Kenegaraan Kasman Singodimedjo." Dalam *Nasionalis Tulen Singa Podium Kasman Singodimedjo: Pemikiran Dan Pergerakan*. Jusuf Kalla School Of Government(Jksg), Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.
- Efrizal, Tegar, Miftah Maisuri Zen, Muhammad Firdaus, dan M. Yakub. "Paradigma Pemikiran Lembaga Dakwah: Analisis Normatif, Struktural, Kultural Dan Transformatif." *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 3 (2026): 412–18. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v4i3.6528>.
- Esposito, John L., dan John O. Voll. *Islam and Democracy*. Oxford University Press, 1996.
- Euben, Roxanne L. *Enemy in the Mirror: Islamic Fundamentalism and the Limits of Modern Rationalism: A Work of Comparative Political Theory*. Princeton University Press, 1999. <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691058443/enemy-in-the-mirror>.
- Fathani, Aqil Teguh, dan Zuly Qodir. "Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila." *Al-Qalam* 26, no. 1 (2020): 117–28. <https://doi.org/10.31969/alq.v26i1.828>.
- Fikri, Hamdani Khaerul. "Dakwah Pada Masyarakat Multikultural." *Mudabbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 4, no. 2 (2023): 129–41. <https://doi.org/10.20414/mudabbir.v4i2.9208>.
- Given, Lisa M. *The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. SAGE Publications, 2008.
- Hatta, Mohammad. *Demokrasi kita*. Pustaka Antara, 1966.
- Hatta, Mohammad. *Tanggung Jawab Moril Kaum Inteligensia*. Fasco, 1957.
- Hatta, Mohammad, Ahmad Subarjdo, AA Maramis, Sunario, dan AG Pringgodigdo. *Uraian Pancasila*. Penerbit Mutiara, 1984.
- Hendra, Tomi. "Dakwah Pada Masyarakat Multikultural." *Hikmah* 14, no. 1 (2020): 1–14.
- Hisyam, Muhamad. "Ki Bagus Hadikusumo Dan Problem Relasi Agama-Negara." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 13, no. 2 (2011): 1–28.
- Huda, Zainol. "Dakwah Islam Multikultural (Metode Dakwah Nabi SAW Kepada Umat Agama Lain)." *Religia* 19, no. 1 (2016): 89–112. <https://doi.org/10.28918/religia.v19i1.661>.
- Ihsani, A. Fikri Amiruddin, Novi Febriyanti, dan Abdan Syakuuroo S.k. "Gus Dur's Multicultural Da'wah and Its Relevance to Modern Society." *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 23, no. 1 (2021): 103–22. <https://doi.org/10.18860/eh.v23i1.11642>.
- Ikhsan, M. Alifudin. "Nilai - Nilai Cinta Tanah Air Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 2 (2017): 108–14.
- Ismail, Ismail, dan Prio Hotman. *Filsafat Dakwah Rekayasa Membangun Agama Dan Peradaban Islam*. Kencana, 2013.
- Kaelan. *Filsafat Pancasila : Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. Paradigma, 2009.
- Kaelan. "Kesatuan Sila-Sila Pancasila." *Jurnal Filsafat* 1, no. 1 (2007): 42–52. <https://doi.org/10.22146/jf.31640>.
- Kamil, Sukron. "Idul Fitri dan Multikulturalisme." Kompas.id, 23 April 2023. <https://www.kompas.id/artikel/idul-fitri-dan-multikulturalisme>.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan ilmu sosial dalam metodologi sejarah*. Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Kasenda, Peter. *Bung Karno panglima revolusi*. Galangpress, 2014.

- Kristianto, Aris, dan Dedy Pradesa. "Landasan Dakwah Multikultural: Studi Kasus Fatwa MUI tentang Pengharaman Pluralisme Agama." *INTELEKSIA: Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah* 2, no. 1 (2020): 153–78. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v2i1.96>.
- Kuntowijoyo. "Menjadikan Dua Strategi Saling Komplementer." Dalam *Islam Demokrasi Atas Bawah Polemik Strategi Perjuangan Umat Model Gusdur Dan Amien Rais*. Pustaka Pelajar, 1996.
- Latif, Yudi. *Negara paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Latif, Yudi. "REAKTUALISASI PANCASILA." Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 2019. [https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_Reaktualisasi%20Pancasila%20\(Yudi%20Latif\).pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_197_Reaktualisasi%20Pancasila%20(Yudi%20Latif).pdf).
- Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*. Yayasan Wakaf Paramadina, 1995.
- Mahanani, Qisthi Faradina Ilma. "Pemikiran Ki Bagus Hadikusuma Tentang Islam Dan Negara Dalam Perumusan Dasar Negara Indonesia (1945-1953)." *El Tarikh : Journal of History, Culture and Islamic Civilization* 1, no. 2 (2020): 1–14. <https://doi.org/10.24042/jhcc.v1i2.6517>.
- Majid, Nurcholish. *Cita-cita politik Islam era reformasi*. Paramadina, 1999.
- Marfu'ah, Usfiyatul. "Strategi Komunikasi Dakwah Berbasis Multikultural." *Islamic Communication Journal* 2, no. 2 (2018): 147. <https://doi.org/10.21580/icj.2017.2.2.2166>.
- Mas'udi, Masdar F. *Syarah Konstitusi: UUD 1945 dalam Perspektif Islam*. Pustaka Alvabet, 2010.
- Muhammad, Firdaus, dan Khaerunnisa Khaerunnisa. "Problematisasi Dakwah Di Tengah Propaganda Agama Di Media Sosial (Perspektif Komunikasi Politik Islam)." *Jurnal Jurnalisa* 6, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.24252/jurnalisa.v6i1.13512>.
- Notonagoro. *Pancasila: secara ilmiah populer*. Bumi Aksara, 1997.
- Nurjannah, Nurjannah. "Faktor Pemicu Munculnya Radikalisme Islam Atas Nama Dakwah." *Jurnal Dakwah* 14, no. 2 (2013): 177–98. <https://doi.org/10.14421/jd.2013.14202>.
- Oemar, Toha Yahya. *Ilmu Dakwah*. Wijaya, 1997.
- Pamungkas, Yudha Catur, Luluk Fikri Zuhriyah, dan Ryan Purnomo. "Konstruksi Dakwah Multikultural Menurut Roza Melina Mazlin." *Kamaya: Jurnal Ilmu Agama* 8, no. 1 (2025): 1–9. <https://doi.org/10.37329/kamaya.v8i1.3714>.
- Prianto, Agung Teguh. "Komunikasi Dakwah Berbasis Multikultural dalam Perspektif Al-Qur'an." *Bil Hikmah: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 1 (2023): 193–210. <https://doi.org/10.55372/bilhikmahjkpi.v1i1.15>.
- Qodir, Zuly. "Kaum Muda, Intoleransi, dan Radikalisme Agama." *Jurnal Studi Pemuda* 5, no. 1 (2018): 429–45. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.37127>.
- Quran.com. "Surah Al-Hujurat - 13." Diakses 8 Juni 2026. <https://quran.com/id/kamar-kamar/13>.
- Quran.com. "Surah Yunus - 99-109." Diakses 3 Juni 2026. <https://quran.com/id/yunus/99-109>.
- Rahardjo, Mudjia. "Studi Teks dalam Penelitian Kualitatif." Teaching Resources. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang., 2018. <http://repository.uin-malang.ac.id/2480/>.
- Ramadani, Maulana Firman. "Tantangan dan toleransi serta multikulturalisme di Indonesia era modern." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 4, no. 4 (2026).
- Rayhaniyah, Sri Ayu. *Dakwah Multikultural*. Media Sains Indonesia, 2020.
- Rizkianto, Anggit. "Falsafah Pancasila Sebagai Basis Pengembangan Dakwah Islam." *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 3, no. 2 (2022): 69–94. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v3i2.53200>.

- Rizkianto, Anggit. *Relasi Agama dan Pancasila: Mengukuhkan Karakter Kebangsaan*. Pustaka Aksara, 2021.
- Rorty, Richard, Jerome B. Schneewind, dan Quentin Skinner. *Philosophy in History: Essays in the Historiography of Philosophy*. Cambridge University Press, 1984.
- Ruslan, Idrus. *Negara Madani: Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. SUKA-Press, 2015.
- Santoso, Roib, Sodik Sodik, Fadliatul Mukhayyaroh, dan Amang Fathurrohman. "Dakwah 'Udeng Vs Teklek': Studi Dakwah Multikultural Mbah Sholeh Semendi Winongan Pasuruan Indonesia." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 17, no. 1 (2017): 77–104. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v17i1.690>.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. "Risalah Sidang BPUPKI-PPKI." 1945. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/RisalahSidangBPUPKI-PPKU-UUD1945.pdf>.
- Singodimedjo, Singo. *Renungan Dari Tahanan*. Permata, 1967.
- Sjamsuddin, Helius. *Metodologi sejarah*. Penerbit Ombak, 2020.
- Soejadi. *Pancasila sebagai sumber tertib hukum Indonesia*. Lukman Offset, 1999.
- Soekarno. *Tjampkan Pantja Sila: Pantja Sila Dasar Falsafah Negara*. Departemen Penerangan RI, 1964.
- Subandi, Ahmad. "Hakikat Dan Konteks Dakwah." *ALQALAM* 18, no. 90–91 (2001): 74. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v18i90-91.1464>.
- Sukirno. "Posisi Agama Dalam Konstruksi Negara Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan UUD 1945." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 1, no. 2 (2021): 96–115. <https://doi.org/10.30588/jhcj.v1i2.920>.
- Suryaningtyas, M. Toto. "Perusakan Makam dan Problem Multikulturalisme di Indonesia." Kompas.id, 25 Mei 2025. <https://www.kompas.id/artikel/perusakan-makam-dan-problem-multikulturalisme-di-indonesia>.
- Syaifuddin, Achmad Fedyani. "Membumikan Multikulturalisme Di Indonesia." *Jurnal Antropologi Sosial Budaya ETNOVISI* 2, no. 1 (t.t.): 3–11.
- Tamirano, Randi. "Peran Manajemen Konflik dalam Meningkatkan Efektivitas Dakwah Multikultural di Indonesia." *JMDIK: Jurnal Manajemen Dakwah dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 1 (2025): 35–49.
- Wahyudi, Agus. "Ideologi Pancasila: Doktrin Yang Komprehensif Atau Konsepsi Politis?" *Jurnal Filsafat* 39, no. 1 (2006): 94–115.
- Ya'qub, Hamzah. *Publisistik Islam : teknik da'wah dan leadership*. Diponegoro, 1992. Bandung.
- Yulianto, Hendra Bagus. "NALAR KEMANUSIAAN DALAM DA'WAH MULTIKULTURAL: Upaya Memformulasikan Pesan Dakwah Humanis." *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* XII, no. 1 (2020): 72–92.
- Zaprul Khan, Zaprul Khan. "Dakwah Multikultural." *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan* 8, no. 1 (2017): 160–77. <https://doi.org/10.32923/maw.v8i1.703>.
- Zinga, Dawn. *Navigating multiculturalism : negotiating change*. Cambridge Scholars Press, 2006.

